

# **MOTIF BANTUAN AUSTRALIA TERKAIT ISU PERUBAHAN IKLIM DI PASIFIK SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN SCOTT MORRISON**

**Raysha Humaira<sup>1</sup>, Haiyyu Darman Moenir<sup>2</sup>**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: <sup>1</sup>raysahumaira27@gmail.com, <sup>2</sup>haiyyu\_darman@yahoo.com

## **Abstrak**

This article aims to analyze Australia's motives under Scott Morrison in increasing its climate assistance to the South Pacific. Under Scott Morrison's leadership, Australia was fundamentally skeptical of climate change issues, such as its policy in developing the coal and gas industry which produces high emissions until it withdrew as a global climate fund donor. However, Australia has actually increased the amount of climate assistance distributed to countries in the South Pacific region. Aini uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data collection method in this article comes from secondary data collected through literature studies, then analyzed using the concept of foreign aid motives by John Degenbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The results of this study found that behind the moral and humanitarian motives, there are Australian efforts to reduce poverty levels in the South Pacific region caused by climate change. Through political motives, it was found that this climate aid was used as Australia's strategy in its battle with China to gain influence and maintain security stability in the South Pacific region. Meanwhile, environmental motives are based on a sense of responsibility to help mitigate and adapt to climate change in developing countries

**Keywords:** Australia, Foreign Aid, Motive, South Pacific, Scott Morrison

***Received*      *Revised*      *Published***

## **Pendahuluan**

Australia menjadi salah satu negara yang ikut merasakan dampak dari perubahan iklim. Adapun dampak perubahan iklim paling buruk yang terjadi di Australia yaitu kebakaran hutan di negara bagian New South Wales, banjir, pemutihan massal *great barrier reef* (sistem terumbu karang terbesar di dunia), siklon, dan gelombang panas.(Joshua Mcdonald, 2022) Sejak Scott Morrison terpilih menjadi Perdana Menteri Australia pada tahun 2018, tidak banyak upaya

yang dilakukan untuk menciptakan langkah-langkah proaktif dalam melawan dampak perubahan iklim. Scott Morrison memimpin partai liberal konservatif, yang secara praktis tidak fokus pada kebijakan lingkungan yang proaktif. (Scott Wilson, 2020) Morrison selalu menolak akan adanya kebijakan iklim yang lebih baik, karena Morrison percaya bahwa Australia telah “bertanggung jawab”, dan percaya bahwa pemanasan iklim pada dasarnya adalah kebiasaan baru yang harus diadopsi. (Martin, 2020)

Walaupun telah merasakan dampak nyata dari perubahan iklim, pemerintah Scott Morrison tetap membuat kebijakan kontradiktif yang mana lebih banyak membuka proyek batu bara dan gas. (Joshua McDonald, 2022) Selain itu, Morrison juga menarik dukungan Australia untuk UNFCCC *Green Climate Fund*, sebagai instrumen pendanaan iklim multilateral. Pada stasiun radio The Alan Jones Breakfast Show (2gb) Morrison mengatakan bahwa Australia dapat memenuhi janjinya di bawah Perjanjian Paris, tanpa menjatuhkan ekonomi di dalam negeri dan tidak menghabiskan uang hanya untuk “dana iklim global”. (Morrison, n.d.) Meskipun Scott Morrison bersikap skeptis dengan isu perubahan iklim hingga menarik Australia sebagai pendonor dana iklim global, di sisi lain Morrison justru meningkatkan pendanaan iklim yang disalurkan ke kawasan Pasifik Selatan.

Peningkatan jumlah bantuan iklim tersebut merupakan awal Scott Morrison menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Dalam konteks ini, pada COP26, Scott Morrison juga menambahkan bantuan sebesar AU\$500 juta untuk tahun 2020-2025 guna membangun ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Ini merupakan peningkatan dari janji Australia sebelumnya kepada Pasifik Selatan untuk menghabiskan AU\$300 juta selama empat tahun (2016-2020). (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), 2018)

Jika dikaitkan dengan kebijakan Scott Morrison yang tidak fokus dengan lingkungan hingga menarik Australia sebagai pendonor dana iklim global, akan tetapi ia justru meningkatkan bantuan iklim khusus ke negara-negara di Pasifik

Selatan. Peneliti menilai bahwa Australia memiliki kepentingan dibalik bantuan iklim yang diberikannya ke kawasan tersebut, karena bantuan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik internasional negara donor, seperti dalam aspek pertahanan, pengaruh politik, dan lain-lain. Bantuan luar negeri Australia juga merupakan hasil dari kebijakan yang ditentukan melalui proses politik dalam negerinya. Hal ini kemudian menarik peneliti untuk mengetahui apa motif Australia dalam memberikan bantuan iklimnya ke Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison.

### **Metode**

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan dan berbasis data sekunder. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang diteliti dan mengambil data dari instansi yang terkait dengan penelitian. Dalam menganalisisnya, peneliti menggunakan kerangka berpikir dari John Degnbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen yang berpendapat bahwa terdapat empat motif yang dimiliki negara donor dalam memberikan bantuan luar negerinya yaitu: motif moral dan kemanusiaan, motif politik, motif ekonomi, dan motif lingkungan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pada kasus ini, ditemukan bahwa, Australia pada masa pemerintahan Scott Morrison, memiliki motif melalui bantuan iklimnya yang disalurkan ke kawasan Pasifik Selatan. Adapun motif dibalik bantuan iklim tersebut yaitu:

1. Motif Moral dan Kemanusiaan
  - a. *Reducing Poverty*

Isu perubahan iklim ini telah menjadi ancaman eksistensial yang paling utama bagi cara hidup masyarakat di Pasifik Selatan, hal tersebut semakin memperburuk tantangan lain yang sudah mempengaruhi kawasan ini. (Sabira Coelho, 2019) Laporan dari *shock waves* menemukan bahwa orang miskin lebih berisiko tinggi terdampak perubahan iklim, seperti gagal panen akibat

berkurangnya curah hujan, lonjakan harga pangan setelah peristiwa cuaca ekstrem, hingga meningkatnya penyakit setelah gelombang panas dan banjir, hal ini dapat mendorong masyarakat kembali dalam kemiskinan. (Mehreen Sheikh, 2015)

Sektor pertanian dan perikanan merupakan pendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat, serta menjadi mata pencaharian utama bagi pekerja di Pasifik Selatan khususnya di daerah pedesaan. (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), 2014) Namun Perubahan iklim memberikan tekanan tambahan yang memperburuk masalah pertanian dan ketahanan pangan di Pasifik Selatan, sehingga akan merugikan terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan penduduknya. Sebagian besar perekonomian Kepulauan Pasifik juga dibatasi oleh luas lahan subur yang relatif kecil, keterpencilan dari pasar utama, dan keterpaparan yang tinggi terhadap pasar luar negeri, dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim tentu saja semakin memperburuk kondisi tersebut.

Australia berupaya untuk membantu masyarakat di Pasifik Selatan yang terdampak perubahan iklim dengan memberikan bantuan program *disaster ready*, salah satunya melalui pelatihan pertanian subsisten skala kecil. Melalui program tersebut, Petani di negara-negara Pasifik Selatan mendapatkan pelatihan keterampilan dalam teknik pertanian subsisten yang tepat dan melindungi lingkungan sekitar. Selain pelatihan pertanian subsisten, Australia juga memberikan bantuan untuk mengelola aspek peraturan yang terkait dengan ekspor produk hasil pertanian mereka. Australia memberikan program bantuan PHAMA Plus yang akan memfasilitasi mitra pasar untuk bekerja sama dengan petani dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kepatuhan terhadap protokol ekspor. (Australian Government, n.d.-b) Program ini tentu saja akan dapat membantu masyarakat di Pasifik Selatan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi negara di tengah tantangan isu perubahan iklim, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

## 2. Motif Politik

### 1. *Peace and Security*

Indikator *peace and security* menjelaskan bagaimana bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di bidang perdamaian dan keamanan. Jika dianalisis dari indikator *peace and security*, peningkatan bantuan iklim Australia ke Pasifik Selatan di bawah pemerintahan Scott Morrison merupakan strategi Australia untuk mempertahankan pengaruhnya di Kawasan Pasifik Selatan, sekaligus sebagai upaya untuk mencegah pengaruh Tiongkok dalam mendekatkan dirinya dengan negara-negara di Pasifik Selatan. (Hallatu & Indrayani, 2022) Meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan, akan memicu berbagai kekhawatiran serta ancaman keamanan khususnya bagi Australia sebagai pemain tradisional di kawasan tersebut, karena dapat dijadikan 'batu loncatan' bagi kekuatan musuh untuk mencapai Australia. (Siti Nadjiha, 2020)

Dalam memperkuat pengaruhnya di Pasifik Selatan, Tiongkok juga memperluas bantuan luar negerinya dengan memberikan bantuan perdagangan, pembangunan infrastruktur, militer, dan pengembangan sumber daya alam. Sejak tahun 2011, Tiongkok telah menginvestasikan AU\$1,3 miliar di kawasan Pasifik dan tercatat sebagai negara pendonor dengan jumlah bantuan yang cukup besar setelah Australia dan Amerika Serikat (Siti Nadjiha, 2020). Investasi langsung Tiongkok di negara-negara kepulauan Pasifik naik 400% antara 2013 dan 2018, dari US\$900 juta menjadi US\$4,5 miliar. Ini sebanding dengan total investasi Australia di Pasifik Selatan yaitu sebesar AU\$18,5 miliar pada tahun 2018.

Investasi dan kepentingan strategis di kawasan ini merupakan upaya menggalang dukungan diplomatik untuk kebijakan luar negeri, khususnya kebijakan "*One China Policy*". Prospek Tiongkok dalam mendapatkan pengaruh ekonomi atas negara-negara Pasifik juga memungkinkan akses militernya ke infrastruktur pertahanan strategis seperti pelabuhan dan lapangan

terbang.(Clare, 2020) Hal ini tentu saja membuat Australia sebagai negara yang paling berpengaruh di kawasan tersebut merasa terancam dengan keberadaan Tiongkok, karena kebangkitan Tiongkok di kawasan Pasifik dapat membuat pengaruh Australia ikut tergeser. Oleh karena itu, Australia perlu menyesuaikan pendekatan terhadap pembangunan di Pasifik Selatan. Salah satunya dengan mengambil tindakan iklim yang signifikan dan pendekatan pembangunan yang inklusif, karena bencana terkait perubahan iklim dianggap sebagai ancaman besar bagi kehidupan masyarakat di Pasifik Selatan.

Kemitraan iklim Pasifik dan Australia, mulai dari *Australian Humanitarian Partnership* dengan biaya AU\$50 juta, *Australia Pacific Climate Partnership* dengan biaya AU\$31,4 juta, hingga memberikan program *Climate and Oceans Support in the Pacific* AU\$23.3 juta, merupakan upaya terbaik dari kapasitas Australia untuk aksi iklim dan ketangguhan bencana di Pasifik.(Department of Foreign Affairs and Trade, n.d.) Ini adalah bagian dari komitmen yang jauh lebih besar dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia untuk memperkuat tanggapan Pasifik terhadap keadaan darurat iklim dan dapat menghadirkan banyak peluang netral secara geopolitik untuk bersaing dengan Tiongkok.(Dermot O’Gorman, n.d.) Berdasarkan indikator *peace and security*, peneliti melihat bahwa Australia menggunakan bantuan iklim sebagai strategi dalam pertempurannya dengan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh di Pasifik Selatan. Bantuan yang Australia berikan dapat memperkuat identitasnya sebagai negara dengan pengaruh utama di Pasifik Selatan.

## 2. *Diplomatic Power*

*Diplomatic power* merupakan indikator yang berkaitan dengan kepentingan politik negara donor untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan secara diplomatis di sistem negara internasional. Dalam studi kasus bantuan iklim Australia ke Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison, peneliti melihat bahwa bantuan ini merupakan bentuk upaya Australia dalam mendapatkan pengakuan internasional bahwa Australia merupakan negara yang

peduli dengan isu perubahan iklim, dan mau membantu negara-negara berkembang dalam adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, Morrison mengumumkan janji peningkatan bantuan iklimnya ke Pasifik Selatan pada saat COP 26 sebagai bentuk kepeduliannya membantu negara berkembang dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Setiap tahunnya Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu perubahan iklim. Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan dalam kerangka UNFCCC, atau disebut juga *Conference of Parties (COP)*, yang bertujuan menilai kemajuan sebuah negara dalam menangani perubahan iklim.(Matthews, 2021) Negara-negara berkembang datang ke COP26 dengan harapan yang akan dibawa oleh negara-negara maju terkait dana tambahan untuk memenuhi komitmen mereka. Sebagai negara maju dengan kapasitas dan tanggung jawab untuk menyediakan keuangan, COP26 mewakili kesempatan bagi Australia untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen untuk membantu tetangganya dalam mengatasi dampak perubahan iklim, hingga upaya membangun citra positif sebagai negara kaya di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, secara khusus Australia berusaha meyakinkan pulau-pulau pasifik bahwa Australia adalah satu-satunya penolong bagi mereka. Morrison memang membatasi partisipasi eksternal Australia dalam *Green Climate Fund* namun tetap menjadi kekuatan besar di kawasan.(Narisya, 2021) Saat COP26 di Glasgow, Scott Morrison mengumumkan peningkatan komitmen pendanaan iklim Australia, menjadi AU\$2 miliar selama 2020-25, dengan setidaknya AU\$700 juta di antaranya untuk pendanaan iklim dan bencana Pasifik.(Department of Foreign Affairs and Trade, n.d.) Bantuan tersebut akan dapat menambah citra Australia sebagai negara yang bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh tetangganya di kawasan Pasifik Selatan sekaligus menjadi kekuatan diplomatik Australia.

*a. Diplomatic Relations*

Indikator ini dicirikan dengan hubungan yang baik melalui kerja sama dan ketergantungan negara penerima terhadap bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor. Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, alokasi bantuan iklim merupakan salah satu upaya Australia untuk memperkuat pengaruhnya di Pasifik Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Pasifik Selatan merupakan kawasan penting bagi Australia. Sejak lama Australia telah mengklaim hubungan khusus dengan negara-negara di Pasifik Selatan sebagai mitra perdagangan, investasi, keamanan, dan pembangunan regional terbesar mereka. (Peter Hooton, 2022)

Namun, kurangnya tindakan domestik Australia terhadap perubahan iklim telah menurunkan reputasi dan kedudukan politiknya dengan para pemimpin dan masyarakat di Pasifik Selatan. Penolakan Australia untuk mengambil tindakan domestik untuk membatasi emisi dan penolakannya terhadap upaya internasional dalam memperkuat komitmen pengurangan emisi telah mengurangi pengaruh Australia serta mempersulit untuk melindungi kepentingan ekonomi dan geostrategisnya di kawasan. (Daniel Hurst and Paul Karp, 2022) Negara-negara di Pasifik Selatan telah lama menuntut Australia berbuat lebih banyak di dalam negeri untuk mengatasi perubahan iklim, mengingat ancaman yang ditimbulkan berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di pulau-pulau kecil.

Menyikapi hal demikian, Australia perlu meninjau kembali kontribusinya sendiri terhadap perubahan iklim, agar Australia tetap menjadi sekutu iklim yang efektif dengan Pasifik Selatan. Untuk itu, Perdana Menteri Scott Morrison berusaha untuk mencegah kritik terhadap kebijakan perubahan iklim Australia dengan menjanjikan ratusan juta dolar untuk mengatasi masalah tersebut. Morrison menguraikan AU\$500 juta selama lima tahun yang dimulai tahun 2020, untuk membantu negara-negara Pasifik berinvestasi dalam energi terbarukan, ketahanan iklim dan bencana alam. (Melissa Clarke, 2019) Melalui



peningkatan bantuan iklimnya, Australia berupaya untuk memperkuat kembali hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di Pasifik Selatan serta menyatakan komitmennya untuk mengambil tindakan iklim yang nyata dan memberikan program bantuan dalam menghadapi krisis iklim. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian bantuan iklim Australia ke Pasifik Selatan merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Scott Morrison untuk meningkatkan kembali hubungan Australia dengan negara-negara di Pasifik Selatan.

### 3. Motif Ekonomi

#### a. *Trade Relation*

Australia memiliki sejarah panjang sebagai mitra perdagangan dan investasi utama dengan banyak negara di Pasifik Selatan. Australia mewakili sekitar 18 persen dari total perdagangan barang dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Di mana Papua New Guinea menjadi negara yang mendominasi perdagangan barang dengan Australia, yang menyumbang 80% dari total perdagangan, diikuti Fiji 8%, dan Kaledonia Baru 6%, ketiga negara ini menjadi mitra dagang Australia Pasifik yang paling signifikan, kemudian 12 negara Kepulauan Pasifik yang tersisa hanya menyumbang 6% dari total perdagangan Australia dengan Pasifik Selatan. (Parliamentary Business, n.d.) .

Adapun negara di kawasan Pasifik Selatan yang menjadi mitra utama dalam perdagangan dua arah Australia adalah Papua New Guinea. Nilai perdagangan dua arah Australia dengan PNG mencapai lebih dari AU\$5 miliar. PNG menyumbang 94% dari total impor Australia, angka tersebut didominasi oleh impor mineral dan emas dari PNG. Hubungan perdagangan Australia dan PNG memiliki sejarah panjang dan didukung oleh investasi bisnis yang didorong oleh perusahaan Australia.

Meskipun demikian, menurut laporan dari DFAT jumlah perdagangan Australia dengan kawasan ini terus mengalami penurunan selama satu dekade terakhir, hal ini dikarenakan hadirnya mitra dagang lainnya, terutama Tiongkok

yang juga meningkatkan perdagangan mereka dengan negara-negara kepulauan Pasifik.(Parliamentary Business, n.d.) Departemen Perindustrian, Sains, Energi, dan Sumber Daya mengidentifikasi bahwa pada tahun 2018, perdagangan dan investasi Australia dengan negara-negara di Pasifik Selatan juga relatif kecil, dengan perdagangan barang dua arah senilai AU\$3,45 miliar, nilai tersebut hanya mewakili sekitar 1% dari total perdagangan Australia secara global. Berikut ini disajikan grafik total ekspor dan impor Australia dengan Papua New Guinea sebagai mitra utama perdagangan Australia di Pasifik Selatan.

Pada tahun 2019 nilai ekspor produk Australia mencapai US\$ 1,9 miliar namun terjadi penurunan hingga US\$1,22 miliar selama tahun 2021. Sementara itu, nilai impor produk Papua New Guinea juga mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2019 nilai impor produk PNG berjumlah US\$ 2,9 miliar, dan turun menjadi US\$ 1,7 miliar. Berdasarkan nilai ekspor dan impor ini, peneliti menilai bahwa peningkatan bantuan iklim Australia tidak didasari oleh keinginan untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan kawasan Pasifik Selatan, karena nilai perdagangan dengan mitra utama Australia yaitu Papua New Guinea bahkan mengalami penurunan.

Tidak hanya nilai ekspor dan impor, kawasan Pasifik Selatan juga tidak termasuk mitra dagang utama Australia, hal ini dibuktikan dengan nilai dagang dua arah Australia. Berdasarkan gambar 1.1 terdapat diagram perdagangan dua arah Australia berdasarkan kawasan pada tahun 2019-2020, terlihat bahwa kawasan Pasifik Selatan tidak termasuk mitra perdagangan Australia yang paling signifikan. Tiongkok menjadi mitra dagang dua arah terbesar Australia dengan 28% saham dari perdagangan dua arah Australia senilai lebih dari US\$250 miliar.(Australian Government, 2021b) Hal ini membuktikan bahwa hubungan perdagangan dua arah Australia dan Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison tidak begitu signifikan dan tidak memiliki keuntungan ekonomi yang banyak dibanding mitra lainnya. Adapun program bantuan iklim yang Australia berikan ke kawasan tersebut, juga tidak ada yang diarahkan untuk

meningkatkan hubungan ekonomi terutama yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi melalui perdagangan.

b. *Investment*

Pada indikator *investment* dijelaskan bahwasannya pemberian bantuan luar negeri oleh negara donor bertujuan untuk meningkatkan investasi terhadap negara penerima bantuan. Berkaitan dengan investasi, pada tahun 2018 Australia di bawah pemerintahan Scott Morrison memberikan bantuan investasi sebesar AU\$2 miliar ke negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan melalui pembangunan infrastruktur untuk adaptasi perubahan iklim. Adapun salah satu bentuk investasi Australia terkait isu perubahan iklim adalah energi terbarukan. Australia bekerja sama dengan tetangga di Pasifik Selatan untuk mendukung target penurunan emisi. Peneliti menilai bahwa langkah Australia dalam memberikan investasi ini bukan digunakan Australia sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomiannya dengan negara-negara di Pasifik Selatan, namun lebih tepatnya sebagai upaya untuk menangkal pengaruh Tiongkok, karena pertumbuhan kekuatan Tiongkok di kawasan tersebut yang terus meningkat. Tiongkok diperkirakan sudah menginvestasikan sekitar AU\$1,3 miliar di kawasan Pasifik sejak tahun 2011 dan menjadi pendonor terbesar nomor dua setelah Australia di kawasan.(Nuralfi Nazmi Laila, 2020)

Dalam menghubungkan indikator *investment* dengan peningkatan bantuan iklim Australia ke Pasifik Selatan pada masa pemerintahan Scott Morrison, peneliti tidak menemukan adanya motif ekonomi Australia dalam memberikan bantuan iklim ke Pasifik Selatan. Hal ini dikarenakan dalam program bantuan iklim yang diberikan, Australia lebih banyak berupaya membangun kawasan Pasifik Selatan dan membantu masyarakat di kawasan tersebut beradaptasi dalam perubahan iklim salah satunya melalui investasi energi terbarukan. Melihat hal ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa Australia tidak memiliki motif ekonomi melalui program bantuan iklimnya di Pasifik Selatan jika dianalisis dengan indikator *investment*.

c. *Access*

Berdasarkan indikator ini, negara donor memberikan bantuan luar negerinya sebagai upaya untuk memperluas pasar perdagangan, mendapatkan sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Dalam studi kasus Australia melalui peningkatan bantuan iklimnya di Pasifik Selatan, peneliti melihat bahwa terdapat salah satu program bantuan iklim yang diberikan, memiliki tujuan untuk perluasan pasar serta memenuhi kebutuhan Australia. Program bantuan tersebut adalah PHAMA Plus, program ini memiliki tujuan untuk membantu petani dan eksportir di negara-negara Kepulauan Pasifik dalam mempertahankan pasar yang ada serta mendapatkan akses ke pasar domestik dan internasional. (Australian Government, 2021a)

4. Motif Lingkungan

a. *Environmental Improvement*

Indikator ini dapat dilihat melalui upaya negara donor dalam membantu mengatasi kerusakan lingkungan di suatu negara. Kerusakan lingkungan dapat menjadi ancaman bagi negara donor karena selain merusak lingkungan juga dapat mengancam kepentingan negara donor dalam melindungi warga negaranya. Untuk itu salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara donor untuk meminimalisir dampak lintas batas yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan adalah dengan memperbaikinya. Jika dikaitkan dengan Australia yang memberikan bantuan terkait isu perubahan iklim di Pasifik Selatan, peneliti menilai bantuan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Australia dalam membantu kerusakan lingkungan yang terjadi di luar wilayahnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program bantuan iklim yang mengarah kepada upaya untuk perbaikan lingkungan di Pasifik Selatan.

Australia di bawah pemerintahan Scott Morrison dalam menyikapi kondisi tersebut berupaya membantu membangun kapasitas negara-negara di Pasifik Selatan dengan memberikan sekitar AU\$2 miliar dalam bentuk kemitraan multilateral seperti SPREP, APCP hingga kerja sama secara bilateral. Dalam

kemitraan SPREP, Pemerintah Australia mendanai proyek *Next Generation Climate Projections for the Western Tropical Pacific*. Program ini memperbarui proyeksi berbasis model bahaya iklim untuk 14 negara mitra di Kepulauan Pasifik, bersama dengan materi panduan non-teknis, dan produk komunikasi untuk memfasilitasi aplikasi sektoral. (*Climate Change Information for the Pacific*, n.d.)

Selain itu, dukungan Australia juga dibangun dalam banyak program bantuan luar negeri, seperti *Reef Cloud*, COSPPac hingga *Pacific Blue Carbon Program*. Pada program *Reef Cloud*, *Institut Ilmu Kelautan Australia meluncurkan platform berbasis digital untuk mendukung kegiatan pemantauan dan konservasi terumbu karang di Pasifik Selatan*. *Reef Cloud* dapat mengidentifikasi jenis karang dan menganalisis bagaimana terumbu karang berubah dari waktu ke waktu yang menganalisis gambar dengan akurasi 80-90%. Selanjutnya, program *pacific blue carbon* yang berupaya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem karbon biru pesisir untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui program ini, Morrison dapat memberikan hasil di Australia dan untuk negara-negara tetangganya di Pasifik Selatan. Berdasarkan program bantuan tersebut, peneliti melihat adanya motif lingkungan, karena bantuan yang diberikan terdapat upaya untuk memperbaiki lingkungan di luar batas wilayah Australia.

b. *International Responsibility*

Indikator ini dapat dilihat dengan adanya tindakan dari negara donor terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di negara penerima bantuan. Menurut John Degnbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen, upaya negara donor dalam mengatasi permasalahan lingkungan dinilai sebagai upaya mempromosikan dirinya di dunia internasional agar dilihat sebagai negara yang bertanggung jawab dalam memperbaiki lingkungan sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara di dunia lainnya.

Perjanjian Paris yang diratifikasi oleh 196 negara termasuk Australia, menguraikan bahwa negara-negara peserta harus memastikan upaya

pengurangan dan adaptasi emisi domestik mereka sendiri, dan negara-negara maju juga harus memperkuat kerja sama dan memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang.(UNFCCC, n.d.) Misalnya, Pasal 9 Perjanjian Paris yang menyatakan bahwa diwajibkan bagi negara maju menyediakan pendanaan dan teknologi untuk negara-negara berkembang, khususnya negara yang sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. (The Paris Agreement, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa Australia sebagai negara yang tergolong maju di kawasannya, diharuskan untuk bekerja sama dengan negara berkembang di Pasifik Selatan melalui penyediaan dana serta dukungan teknologi untuk memastikan peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim di negara mereka.

Perjanjian Paris dapat menjadi penyeimbang antara perlindungan kepentingan nasional Australia dan tanggungjawab kepada negara-negara yang rentan dalam perubahan iklim. Kepentingan nasional tersebut berupa inisiatif global untuk mempertahankan aksesnya ke kekuatan yang lebih besar dalam kelembagaan multilateral. Bantuan tersebut memberikan lebih banyak peluang bagi peranan Australia untuk menjadi lebih kuat dari sekutunya, hingga dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Berkaitan dengan peningkatan bantuan iklimnya, terlihat bahwa Australia telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai negara maju untuk membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti di Pasifik Selatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pada masa pemerintahan Scott Morrison, Australia memiliki motif melalui bantuan iklimnya. Pertama, melalui motif moral dan kemanusiaan, terlihat adanya upaya Australia untuk mengurangi kemiskinan di Pasifik Selatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Kemudian berdasarkan motif politik, bantuan iklim tersebut merupakan strategi Australia untuk menjaga keamanan di kawasannya. Motif ini juga menjadi yang paling

dominan dikarenakan kekuatan Tiongkok yang semakin berkembang di kawasan, membuat Australia mencari cara agar dapat mempertahankan pengaruhnya. Pada motif ekonomi, peneliti menemukan motif Australia berdasarkan indikator *access*, yang bertujuan untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan perekonomian di bidang pertanian dan perikanan. Selanjutnya, melalui motif lingkungan, terdapat upaya Australia dalam membantu mengatasi kerusakan lingkungan di Pasifik Selatan, pada program *Reef Cloud* dan *pacific blue* Australia berupaya untuk memperbaiki lingkungan di luar batas wilayah negaranya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2007). *“Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approach ”*, Edisi ke-4. Sage Publication. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Hallatu, F. D., & Indrayani, I. (2022). Australian Foreign Aid Motivation For Tuvalu In Efforts To Cope With Climate Change 2015 - 2020. *Journal of Social Political Sciences*, 3(1), 1–17.
- Juita, D. N. S., & Wardhani, B. L. S. W. (2021). Bantuan Australia kepada Kiribati melalui Program Kiribati Australia Nursing Initiative (KANI). *Insignia: Journal of International Relations*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2021.8.1.3486>
- Narisya, S. D. (2021). Australia’s Middle Power Approach Towards Climate Change in Pacific Island. *Jurnal Transformasi Global*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2021.008.01.1>
- Nuralfi Nazmi Laila. (2020). Australia ’ s Foreign Relations with Pacific Countries in the Economic Sector for the 2012-2018 Period. *Jurnal Uin Sunan Gunung Djati, Vol 2(2)*, 78–87. <https://doi.org/10.15575/ks.v2i2>.
- Siti Nadjiha. (2020). Persaingan China-Australia Dalam Perebutan Pengaruh di Kawasan Pasifik. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 4(1), 33–45. <https://dx.doi.org/10.33541/japs.v4i1.1640>